

## OPTIMALISASI TUGAS CAMAT DALAM MENGGKOORDINASI KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KECAMATAN LARANGAN KOTA TANGERANG

Kamaludin<sup>1</sup>, Doddy Mulyono<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Yuppentek Indonesia

Email: kamaludin.nice@gmail.com doddymulyono2020@gmail.com

### **Abstract**

*In this study, there was a sample of 104 people, consisting of the sub-district head, the sub-district secretary, the head of the empowerment section, 3 village heads and 98 people from the Larangan sub-district community. The sampling technique used for the community uses the purpose sampling method, namely determining the sample with certain considerations because the number is large and adjusted to the research objectives. For sub-district heads, sub-district secretaries and heads of community empowerment sections, the census collection technique was used. The data collection technique used in this research was primary data collected by filling out questionnaires and interviews, while secondary data was obtained by observation. In analyzing the researcher used table tools. Based on the analysis carried out by the researchers, it can be concluded that the Optimization of the Subdistrict Head's Duties in Coordinating Community Empowerment Activities in Larangan District, Tangerang City has been considered quite good. To further increase community participation in carrying out community empowerment activities, the sub-district should conduct training for the community to provide input and knowledge, so that the community has the ability to participate in empowerment programs carried out by the sub-district, so that it can produce quality human resources.*

*Key words: Duties of the sub-district head, coordination, community empowerment*

### **Abstrak**

Pada penelitian ini terdapat sampel sebanyak 104 orang, yang terdiri dari camat, sekretaris camat, kepala seksi pemberdayaan, 3 orang lurah dan 98 orang masyarakat kecamatan Larangan. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk masyarakat menggunakan metode purpose sampling yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu karena jumlahnya yang besar dan disesuaikan dengan maksud penelitian. Untuk camat, sekretaris camat, dan kepala seksi pemberdayaan masyarakat digunakan teknik penarikan sensus. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu, data primer yang dikumpulkan dengan mengisi kuesioner dan wawancara, sedangkan data sekunder didapatkan dengan hasil observasi. Dalam menganalisis peneliti menggunakan alat bantu tabel. Berdasarkan analisis yang peneliti lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang sudah dinilai cukup baik. Untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pihak kecamatan sebaiknya melakukan pelatihan terhadap masyarakat untuk memberi masukan serta pengetahuan, agar masyarakat mempunyai kemampuan untuk ikut serta dalam program pemberdayaan yang dilakukan oleh kecamatan, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

**Kata kunci:** Tugas Camat, Koordinasi, Pemberdayaan Masyarakat

### **PENDAHULUAN**

Dalam Peraturan Walikota Tangerang Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, camat mempunyai tugas

untuk mengkoordinasi pemberdayaan masyarakat dimana kegiatan Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses pembangunan dimana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri.

Tujuan dari pemberdayaan masyarakat (Onny S. Prijiono, 1995:97) adalah untuk memberdayakan masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu untuk mengembangkan masyarakat itu sendiri menjadi lebih maju. Pemberdayaan itu sendiri diharapkan merubah tatanan hidup masyarakat menjadi lebih maju, sebagaimana cita-cita kita bersama menjadikan masyarakat yang adil dan makmur serta sejahtera.

Sebagaimana diketahui bahwa pada beberapa tahun terakhir ini banyak kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah, terutama program pemberdayaan masyarakat golongan bawah. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, bahwa pelaksanaan program atau kegiatan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan adalah berada dalam koordinasi oleh camat dalam kedudukan/statusnya selaku kepala Wilayah kerja Kecamatan. dengan demikian camat mempunyai peranan penting dalam pemberdayaan masyarakat di Wilayah kerja Kecamatan.

Hal itu dapat di indikasikan oleh beberapa kenyataan seperti adanya program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dari unit-unit kerja pemerintah kurang atau tidak mengarah pada pemberdayaan masyarakat kelompok sasaran. Contoh di Kecamatan Larangan pada saat observasi awal di Kecamatan Larangan ditemukan di Kelurahan Larangan Indah terdapat kegiatan yang seharusnya dibiayai oleh dana Bantuan Covid 19 diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin (seperti pelatihan keterampilan berusaha, bantuan modal usaha), pada kenyataannya lebih banyak digunakan untuk pembangunan proyek fisik seperti pembuatan jalan, perbaikan jalan dan drainase.

Terkait dengan kondisi ini, maka dibutuhkan peran kepemimpinan dalam mengkoordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat agar masyarakat dapat terlibat dan tepatnya sasaran dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat serta dapat terjaminnya kehidupan masyarakat terutama masyarakat di Kecamatan Larangan. Maka dibutuhkan pelaksanaan program kegiatan untuk membangun keberdayaan masyarakat melalui interaksi masyarakat yang terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian suatu kegiatan pemberdayaan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan

masyarakat. Di Kecamatan Larangan Kota Tangerang terdapat beberapa permasalahan tersebut mengindikasikan belum optimalnya peranan camat dalam pemberdayaan masyarakat melalui peranan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan melalui peranan membina dan mengawasi unit-unit kerja pemerintah di kecamatan dalam pemberdayaan masyarakat. Indikasi masalah tersebut nampaknya menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui suatu penelitian ilmiah.

Berdasarkan wawancara dan observasi awal di Kecamatan Larangan Kota Tangerang terdapat kelemahan dalam pelaksanaan tugas pemberdayaan kepada masyarakat tersebut yang masih menimbulkan beberapa fenomena yaitu terdapat anggapan masyarakat bahwa camat masih kurang optimal dalam menjalankan program kerjanya, seperti yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 10 poin (b) yaitu mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Hal ini terlihat dari program kegiatan pemberdayaan masyarakat yang belum optimal.

## **KAJIAN PUSTAKA**

Tugas merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan, pekerjaan yang merupakan tanggung jawab, perintah untuk berbuat atau melakukan sesuatu demi mencapai suatu tujuan. Menurut Dale Yoder dalam Moekijat (2013:9) "The Term Task is frequently used to describe one portion or element in a job" (tugas digunakan untuk mengembangkan satu bagian atau satu unsur dalam suatu jabatan).

Menurut G. R. Terry dalam bukunya, *Principle of Management* yang dikutip Handayani (2019:55) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Menurut tinjauan manajemen, koordinasi menurut Terry meliputi:

- a. Jumlah usaha baik secara kuantitatif, maupun secara kualitatif
- b. Waktu yang tepat dari usaha-usaha tersebut
- c. Directing atau penentuan arah usaha-usaha tersebut

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disebutkan bahwa koordinasi memiliki syarat-syarat yakni :

- a. Sense of Cooperation, perasaan untuk saling bekerja sama, dilihat per bagian.
- b. Rivalry, dalam organisasi besar, sering diadakan persaingan antar bagian, agar saling berlomba
- c. Team Spirit, satu sama lain per bagian harus saling menghargai.
- d. Esprit de corps bagian yang saling menghargai akan makin bersemangat

Selanjutnya kordinasi memiliki sifat-sifat:

- a. Koordinasi adalah dinamis, bukan statis.
- b. Koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang manajer dalam kerangka mencapai sasaran.
- c. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan.

Menurut Handyaningrat (2019:80) Koordinasi dalam proses manajemen dapat diukur melalui indikator berikut ini:

1. Komunikasi
  - a. Ada tidaknya informasi
  - b. Ada tidaknya alur informasi
  - c. Ada tidaknya teknologi informasi
2. Kesadaran pentingnya koordinasi
  - a. Tingkat pengetahuan pelaksanaan terhadap koordinasi
  - b. Tingkat ketaatan terhadap koordinasi
3. Kompetensi partisipan
  - a. Ada tidaknya pejabat yang berwenang terlibat
  - b. Ada tidaknya ahli dibidang pembangunan yang terlibat
4. Kesepakatan, komitmen, dan insentif koordinasi
  - a. Ada tidaknya bentuk kesepakatan
  - b. Ada tidaknya pelaksanaan kegiatan
  - c. Ada tidaknya sanksi bagi pelanggar kesepakatan
  - d. Ada tidaknya Insentif bagi pelaksana kesepakatan
5. Kontinuitas perencanaan
  - a. Ada tidaknya umpan balik dari obyek dan subyek pembangunan
  - b. Ada tidaknya perubahan terhadap hasil kesepakatan

Berdasarkan pengertian di atas jelaslah bahwa koordinasi adalah tindakan seorang pimpinan untuk mengusahakan terjadinya keselarasan, antara tugas dan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang atau bagian yang satu dengan bagian yang lain. Dengan koordinasi ini diartikan sebagai suatu usaha ke arah keselarasan kerja antara anggota organisasi sehingga tidak terjadi kesimpang siuran, tumpang tindih. Hal ini berarti pekerjaan akan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Pemberdayaan menunjukkan pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah, sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam:

- a. Memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.
- b. Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa- jasa yang mereka perlukan.
- c. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.

Perumusan masalah yang dibuat yaitu sebagai berikut: Bagaimana Mengoptimalisasi Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang?.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kombinasi penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif dengan metode deskriptif ini berusaha untuk memaparkan mengenai Optimalisasi Tugas Camat dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif ini berusaha mengungkap berbagai permasalahan yang menghambat dalam Optimalisasi Tugas Camat dalam

Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Menurut Kirk dan Miller (Sugiyono, 2009 : 4) mendefinisikan bahwapenelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun peristilahannya.

Sedangkan penelitian kuantitatif (Sugiyono, 2019:4) adalah penelitian ilmiah yang dilakukan secara sistematis yang dilakukan untuk menyelidiki suatu masalah dan menyajikan data berupa angka. Pada penelitian kuantitatif ini menggunakan angket penelitian menjadi instrumen penting yang digunakan untuk mendapatkan data.

Berhubungan dengan masalah penelitian diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Camat Larangan, Sekretaris Camat, Seksi Kemasyarakatan, Lurah, dan Masyarakat Kecamatan Larangan. Untuk keterangan lebih jelas dapat dapat di lihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 1. Populasi dan Sampel**

No	Nama	Populasi	Sampel	Keterangan
1	Camat Larangan	1	1	
2	Sekretaris Camat	1	1	
3	Kepala Seksi Kemasyarakatan	1	1	
4	Lurah/Pejabat Kelurahan	8	3	
5	Masyarakat Kecamatan Larangan	148975	98	Setiap Kelurahan rata-rata 12 Angket
	<b>Jumlah</b>	<b>148986</b>	<b>104</b>	

Sampel adalah Sebagian dari populasi yang memiliki karakteristik yang relatif sama dan dianggap bisa mewakili populasi. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi yang akan diteliti. Teknik penarikan sampel yang di pergunakan penulis dalam penelitian ini bertitik tolak pada jumlah populasi yang dapat di jangkau oleh peneliti. Diambil dari seluruh populasi yang memungkinkan dapat menghasilkan pengumpulan data yang akurat. Teknik penarikan sampel yang digunakan untuk Camat, Sekretaris camat, dan Kepala seksi kemasyarakatan adalah teknik penarikan sensus yaitu, dengan penetapan seluruh populasi yang dijadikan sebagai sampel penelitian teknik ini digunakan karena jumlah sampelnya yang cukup kecil. Sedangkan untuk Lurah dan Masyarakat Kecamatan Larangan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu karena jumlahnya yang besar dan disesuaikan dengan maksud penelitian..

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Karakteristik Responden

Gambaran dari karakteristik 104 orang responden yang menjadi sampel penelitian berdasarkan jenis kelamin dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2. Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan**

No	Keterangan	Frekuensi	Persentase	
1	<b>Jenis Kelamin</b>			
	a	Laki-laki	53	50,96%
	b	Perempuan	51	49,04%
		<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>100%</b>
2	<b>Tingkat Pendidikan</b>			
	a	SD	1	0,96%
	b	SMP/Sederajat	13	12,50%
	c	SMA/Sederajat	70	67,31%
	d	Strata Satu (S1)	19	18,27%
	e	Strata Dua (S2)	1	0,96%
		<b>Jumlah</b>	<b>104</b>	<b>100,00%</b>

Sumber: Penelitian 2023

### 2. Hasil Data Indikator Komunikasi

Pada indikator komunikasi terdapat 3 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut ini merupakan hasil dari tanggapan responden:

**Tabel 3. Indikator Komunikasi**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori					
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik	
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%
1	Memberikan Informasi	53	50,96%	46	44,23%	5	4,81%
2	Memberikan Alur Informasi	60	57,69%	36	34,62%	8	7,69%
3	Memberikan Teknologi Informasi	49	47,12%	49	47,12%	6	5,77%
	<b>Jumlah</b>	<b>162</b>		<b>131</b>		<b>19</b>	
	<b>Rata-rata</b>	<b>54,00</b>		<b>43,67</b>		<b>6,33</b>	
	<b>Persentase</b>	<b>52%</b>		<b>42%</b>		<b>6%</b>	

Dari keseluruhan penilaian yang diberikan oleh responden pada indikator komunikasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah responden dalam kategori baik sebanyak 162 orang dengan rata-rata 54 dan besarnya persentase 52%, jumlah responden dengan kategori cukup baik sebanyak 131 orang dengan rata-rata 43,67 dan besarnya persentase 42%, dan

jumlah responden dengan kategori kurang baik sebanyak 19 orang dengan rata-rata 6,3 dengan besarnya persentase 6%.

### 3. Hasil Data Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi

Pada indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi terdapat 2 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut ini merupakan hasil dari tanggapan responden:

**Tabel 4. Indikator Kesadaran Pentingnya Koordinasi**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori						Jumlah
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
1	Pengetahuan Pelaksanaan terhadap Koordinasi	58	55,77%	40	38,46%	6	5,77%	104
2	Ketaatan Terhadap Hasil Koordinasi	54	51,92%	47	45,19%	3	2,88%	104
	<b>Jumlah</b>	<b>112</b>		<b>87</b>		<b>9</b>		<b>208</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>56,00</b>		<b>43,50</b>		<b>4,50</b>		<b>104,00</b>
	<b>Persentase</b>	<b>54%</b>		<b>42%</b>		<b>4%</b>		<b>100%</b>

Dari keseluruhan tanggapan responden pada indikator kesadaran pentingnya koordinasi dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi produktif di Kecamatan Larangan Kota Tangerang , maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dengan kategori baik sebanyak 112 orang dengan rata-rata 56 dan besarnya persentase 54%, jumlah responden dengan kategori cukup baik sebanyak 87 orang dengan rata-rata 43,5 persentase sebesar 42%, dan jumlah responden dengan kategori kurang baik sebanyak 9 orang dengan rata-rata 4,5 dan persentase sebesar 4%

### 4. Hasil Data Indikator Kompetensi Partisipan

Pada indikator Kompetensi Partisipan terdapat 2 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut ini merupakan hasil dari tanggapan responden:

**Tabel 5. Indikator Kompetensi Partisipan**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori						Jumlah
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		
		Nominal	%					
1	Ada tidaknya Pejabat tang Berwenang yang Terlibat	62	59,62%	36	34,62%	6	5,77%	104
2	Ada tidaknya Ahli dibidang Pembangunan terlibat	67	64,42%	32	30,77%	5	4,81%	104
	<b>Jumlah</b>	<b>129</b>		<b>68</b>		<b>11</b>		<b>208</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>64,50</b>		<b>34,00</b>		<b>5,50</b>		<b>104,00</b>
	<b>Persentase</b>	<b>62%</b>		<b>33%</b>		<b>5%</b>		<b>100%</b>

Berdasarkan tanggapan responden, maka dapat disimpulkan dalam indikator kompetensi partisipani pada penelitian Optimalisasi Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan di Kecamatan Larangan Kota Tangerang dapat dikategorikan Baik dengan persentase sebesar 62% dari 104 orang jumlah responden

#### 5. Hasil Data Indikator Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koodinasi

Pada indikator Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koodinasi terdapat 3 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut ini merupakan hasil dari tanggapan responden:

**Tabel 6. Indikator Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koodinasi**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori						Jumlah
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
1	Ada tidaknya Bentuk Kesepakatan	53	50,96%	44	42,31%	7	6,73%	104
2	Ada Tidaknya Pelaksana Kegiatan	61	58,65%	37	35,58%	6	5,77%	104
3	Ada Tidaknya Sanksi Bagi Pelanggar Kesepakatan	54	51,92%	46	44,23%	4	3,85%	104
4	Ada Tidak Insentif Bagi Pelaksana Koordinasi	59	56,73%	39	37,50%	6	5,77%	104
	<b>Jumlah</b>	<b>227</b>		<b>166</b>		<b>23</b>		<b>416</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>56,75</b>		<b>41,50</b>		<b>5,75</b>		<b>104,00</b>
	<b>Persentase</b>	<b>55%</b>		<b>40%</b>		<b>6%</b>		<b>100%</b>

Dari keseluruhan tanggapan yang diberikan responden pada indikator kesepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah responden dengan

kategori baik sebanyak 227 orang dengan rata-rata 56,75 dan persentase sebesar 55%, jumlah responden dengan kategori cukup baik sebanyak 166 orang dengan rata-rata 41,5 dan persentase sebesar 40%, dan jumlah responden dengan kategori kurang baik sebanyak 23 orang dengan rata-rata 5,75 dan persentase sebesar 5,77%.

## 6. Hasil Data Indikator Kontinuitas Perencanaan

Pada indikator Kontinuitas Perencanaan terdapat 2 pertanyaan yang diajukan kepada responden. Berikut ini merupakan hasil dari tanggapan responden:

**Tabel 7. Indikator Kontinuitas Perencanaan**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori						Jumlah
		Baik		Cukup Baik		Kurang Baik		
		Nominal	%	Nominal	%	Nominal	%	
1	Ada tidaknya Timbal Balik dari Objek dan Subjek Pembangunan	54	51,92%	47	45,19%	3	2,88%	104
2	Ada tidaknya Perubahan terhadap Hasil Kesepakatan	55	52,88%	44	42,31%	5	4,81%	104
	<b>Jumlah</b>	<b>109</b>		<b>91</b>		<b>8</b>		<b>208</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>54,50</b>		<b>45,50</b>		<b>4,00</b>		<b>104,00</b>
	<b>Persentase</b>	<b>52%</b>		<b>44%</b>		<b>4%</b>		<b>100%</b>

## 7. Hasil Rekapitulasi Tanggapan Responden tentang Pelaksanaan Tugas Camat dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan

**Tabel 8. Indikator Rekapitulasi**

No	Item Penilaian	Frekuensi Per Kategori			Jumlah
		Baik	Cukup Baik	Kurang Baik	
1	Komunikasi	54,00	43,67	6,33	104
		52%	42%	6%	
2	Kesadaran Pentingnya Koordinasi	56,00	43,50	4,50	104
		54%	42%	4%	
3	Kompetensi Persiapan	64,50	34,00	5,50	104
		62%	33%	5%	
4	Kesepakatan, Komitmen dan Insentif Koordinasi	56,75	41,50	5,75	104
		55%	40%	6%	
5	Kontinuitas Perencanaan	54,50	45,50	4,00	104
		52%	44%	4%	
	<b>Jumlah</b>	<b>285,75</b>	<b>208,17</b>	<b>26,08</b>	<b>520</b>
	<b>Rata-rata</b>	<b>57,15</b>	<b>41,63</b>	<b>5,22</b>	<b>104</b>
	<b>Persentase</b>	<b>55%</b>	<b>40%</b>	<b>5%</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan data tabel di diatas, yang telah direkapitulasi diatas menjelaskan bahwa Optimalisasi Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang yang dinilai dari indikator komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kesepakatan komitmen dan insentif, dan kontinuitas perencanaan melalui tanggapan yang diberikan oleh responden secara keseluruhan berada dalam kategori cukup baik dengan jumlah rata-rata 57,15 dan persentase sebesar 55%. Tanggapan yang telah diberikan responden untuk seluruh kategori ini dianggap sudah dapat mewakili warga di Kecamatan Larangan dalam memberi penilaian terhadap Optimalisasi Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang, sehingga dapat disimpulkan bahwa tugas camat tersebut sudah cukup maksimal. Maka pada hasil penelitian ini dapat dikategorikan dalam kategori baik.

## **KESIMPULAN**

Dari pembahasan hasil penelitian serta analisis yang peneliti lakukan di lapangan maka dapat diambil kesimpulan tentang Optimalisasi Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang yang diuraikan dalam indikator komunikasi, kesadaran pentingnya koordinasi, kompetensi partisipan, kepakatan, komitmen dan insentif koordinasi, serta kontinuitas koordinasi secara keseluruhan berada dalam kategori baik yaitu dengan jumlah rata-rata 57 dan persentase sebesar 55%. Karena dalam pelaksanaannya memberi perubahan yang cukup baik terhadap kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Artinya Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang di sudah dilakukan secara optimal hal ini terbukti dari hasil wawancara dan angket menyatakan cukup baik Tugas Camat Dalam Mengkoordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kecamatan Larangan Kota Tangerang. Hasil koordinasi oleh camat perihal pemberdayaan Masyarakat antara lain adanya nilai lebih yang didapatkan dari suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan peningkatan jumlah UMKM di wilayah Kecamatan Larangan, terciptanya usaha kecil Masyarakat sebagai akibat pembinaan UMKM yang merupakan salah satu kegiatan pemberdayaan Masyarakat..

## DAFTAR PUSTAKA

- Azis Muslim. 2012. Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat, (Yogyakarta: Samudra Biru
- Edi Soeharto, 2015. Membangun Masyarakat dan Memberdayakan Rakyat, Jakarta: PT. Refika Aditama
- Esrom Aritonang, dkk, Pendampingan Komunitas Pedesaan, (Jakarta: Sekertariat Bina Desa, 2001
- Ginandjar Kartasasmitha, Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,1996
- Handayani, Soewarno. 2019, Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Haji Masagung
- Handoko, T. Hani, 2013, Manajemen Edisi Kedua, BPFE:Yogyakarta
- Harsono. 2018. Coaching dan Aspek-aspek Psikologis dalam Coaching. Jakarta: Depdikbud.
- Hasibuan.2016. Koordinasi Dasar, Pengertian, dan Masalah, Edisi Revisi, Bumi Aksara: Jakarta
- Isbandi Rukminto Adi, 2008. Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta: PT Grafindo Persada
- Kaloh, J. 2020. Kepemimpinan Kepala Daerah. Jakarta, Sinar Grafika
- Maksudi, Beddy Irawan. 2017, Dasar-Dasar Administrasi Publik. Cimande Hilir. Bogor: PT. Raja Grafindo
- Maksudi, Beddy Iriawan, 2014, Sistem Politik Indonesia, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Moekijat. 2013. Perencanaan dan Pengembangan Karir Pegawai. Bandung, Ramaja Rosdkarya
- Nasution. 2013, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif. Bandung: Tarsito
- Onny. S. Priyono, 1996. Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasinya, Jakarta: CSIS
- Pasalong, Harban. 2013. Kepemimpinan Birokrasi. Bandung, Alfabeta
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Pembentukan 7 (Tujuh) Kecamatan.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah termasuk dalam klasifikasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
- Peraturan Walikota Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
- Peraturan Walikota Tangerang Nomor 10 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tangerang Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota Kepada Camat
- Phillips D. Allen dan Hornak James E. 1979. Measurement and Physi-cal Education. New York: John Wiley and Sons
- Sanjoto. 2019. Penguatan dan Pembinaan Kondisi Fisik. Semarang: IKIP
- Siagian, Sondang. 2005. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta : PT. Bumi Askara,
- Singarimbun, M. 2006. Metode penelitian Survei. Jakarta. LP3ES
- Soejono, Abdurrahman. (2015), Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan. Bandung: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2009), Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2019), Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : Alfabeta

- Syafiie, Inu Kencana. 2013, Ilmu Pemerintahan. Jakarta: Bumi Aksara.Pertja
- Syafiie, Inu Kencana. 2013. Teori dan Analisis Politik Pemerintahan. Jakarta:
- Syamsudin RS, 2019. Dasar-Dasar Pengembangan Masyarakat Islam Dalam Da'wah Islam, (Bandung: KP. HADID)
- Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Wahab, Solichin Abdul. 2013. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakanaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara.
- Zubaedi, 2007. Wacana Pembangunan Alternatif: Ragam Perspektif Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media